

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peranan penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing maju dan sejahtera. Kesejahteraan merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi. Peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka semakin baik kegiatan ekonominya, begitu juga sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat kesejahteraan yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi karena tenaga kerja baru yang bertambah jauh lebih besar dibandingkan dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia belum memenuhi taraf tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga menyebabkan taraf pengangguran yang tinggi. Pengangguran juga dapat mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan oleh pendapatan negara juga akan berkurang. Karena, pendapatan nasional negara diukur dari persentase jumlah seluruh pendapatan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan dibagi dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia. Jika jumlah penghasilan lebih sedikit maka rata-rata pendapatan nasional negara akan lebih kecil karena jumlah penduduk belum sebanding dengan jumlah pendapatan nasional.<sup>2</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa bulan September

---

<sup>2</sup> Siti Indayani dan Budi Harsono, "Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*. E-ISSN 2550-1178. Vol. 18 No. 2. 2020, hal. 202

2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 27,55 juta orang dibandingkan bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin semakin tinggi yaitu 1,13 juta orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan bulan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Hal ini diketahui bahwa persentase penduduk miskin pada bulan September 2020 tercatat sebanyak 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap bulan September 2019. Kenaikan yang terjadi bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri, salah satunya dengan mendirikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM ini tidak hanya bermanfaat untuk penyaluran pendapatan masyarakat, namun juga mampu menciptakan kreasi bagi masyarakat dengan mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam taraf yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.<sup>4</sup>

Di bawah ini adalah data jumlah peningkatan perkembangan UMKM di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Berita Resmi Statistika diakses pada tanggal 26 Maret 2021 dari <http://www.bps.go.id>

<sup>4</sup> Feni Dwi Anggraeni, dkk, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha Emping Jagung di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 No. 6, hal. 1286

**Tabel 1.1**  
Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2017-2018

No.	Keterangan	Jumlah		Presentase	
		2017	2018	2017	2018
1	Usaha Mikro	62.106.900	63.350.222	98,70%	98,68%
2	Usaha Kecil	757.090	783.132	1,20%	1,22%
3	Usaha Menengah	58.627	60.702	0,09%	0,09%
<b>Total UMKM</b>		<b>62.922.617</b>	<b>64.194.057</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>

Sumber: Kementerian Koperasi Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah total UMKM di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit, dengan rincian Usaha Mikro sebanyak 62.106.900 unit (98,70%), Usaha Kecil dengan total 757.090 unit (1,20%) dan Usaha Menengah berjumlah 58.627 unit (0,09%), dan data terakhir yang tertera di tahun 2018 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 64.194.057 unit, dengan rincian Usaha Mikro sebanyak 63.350.222 bagian (98,68%), Usaha Kecil sebanyak 783.132 bagian (1,22%), dan Usaha Menengah sebanyak 60.702 bagian (0,09%). Dengan ini UMKM telah berkontribusi sebesar 60,3% dari PDB, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 116.978.631 tenaga kerja. Dan mencapai nilai total ekspor sebesar 18,72%.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penunjang kekuatan ekonomi Indonesia. Aktivitas ekonomi di Jawa Timur ini menyumbang hampir 15 persen produk domestik bruto nasional, nomer dua setelah DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 5,52

terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori penyediaan fasilitas dan makan minumannya sebesar 7,58%, jasa kesehatan dan kegiatan socialnya 7,55% serta informasi dan komunikasinya 7,36%.<sup>5</sup>

Berikut adalah data jumlah UMKM di Jawa Timur pada tahun 2019.

**Tabel 1.2**  
Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah UMKM sektor pertanian	4.112.443
2	Jumlah UMKM sektor perdagangan, hotel dan restoran	1.720.042
3	Jumlah UMKM sektor jasa	411.342
4	Jumlah UMKM sektor industri pengolahan	592.104
<b>Total</b>		<b>6.835.931</b>

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dalam Angka 2020

Dari data diatas Provinsi Jawa Timur, mengklasifikasikan UMKM berdasarkan sektornya, dimana sektor pertanian menempati posisi teratas yaitu sejumlah 4.112.443 diikuti oleh sektor perdagangan, hotel serta restoran sebesar 1.720.042, berikutnya sektor jasa sebanyak 411.342 UMKM, dan terakhir sektor industri pengolahan sebanyak 592.104. Serta mampu menyerap tenaga kerja sampai 14,2 juta orang. Dan telah berkontribusi 57,52% dari PDRB, dan konstribusinya terhadap PDB mencapai 5,4% di atas rata-rata nasional 5,1%.<sup>6</sup>

Tulungagung merupakan kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Tulungagung sendiri terkenal sebagai penghasil marmer terbesar di

---

<sup>5</sup> Antonius Purwanto, "Provinsi Jawa Timur Menjadi Pusat Kegiatan Ekonomi Sekaligus Pintu Gerbang Aktivitas Ekonomi Bagi Penduduk Indonesia Bagian Timur", <https://kompaspedia.kompas.id>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 03.00

<sup>6</sup> Dilansir dari portal [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Data Sensus Ekonomi (SE) dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Indonesia. Oleh sebab itu dalam hal ekonomi, Tulungagung merupakan salah satu kota yang mendapati peningkatan angka pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut didukung oleh upaya masyarakat dan pemerintah untuk mempertahankan lahan pertanian dan menciptakan SDM yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya UMKM yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Menurut data BPS peningkatan jumlah UMKM Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
Jumlah UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1	2015	48.650
2	2016	51.569
3	2017	53.488
4	2018	57.897
5	2019	62.818
<b>Total</b>		<b>274.422</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung dalam angka 2020

Dari data diatas, Diketahui bahwa pada tahun 2015 berjumlah 48.650, tahun 2016 dengan jumlah 51.569, pada tahun 2017 berjumlah 53.488, tahun 2018 berjumlah 57.897, dan pada tahun 2019 berjumlah 62.818. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung setiap Tahunnya mengalami peningkatan.

Sumbergempol merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki berbagai jenis UMKM, yaitu yang paling banyak adalah usaha di bidang usaha perikanan. Namun bukan hanya itu saja masih banyak usaha-usaha lainnya. Jumlah UMKM yang ada di kecamatan

Sumbergempol yaitu berjumlah 2.862 UMKM. Yang terdiri dari 2.194 termasuk dalam kriteria usaha mikro, 571 termasuk dalam kriteria usaha kecil, dan 97 termasuk dalam kriteria usaha menengah. Dari sekian banyak UMKM tersebut yang melakukan pembiayaan di BSI (BRI Syariah) guna untuk membantu masalah permodalan dalam usahanya yaitu berjumlah 25 UMKM.

Modal menjadi salah satu kendala yang di alami pelaku dalam mengembangkan usahanya. Dalam mengoptimalkan tingkat perekonomian masyarakat, pemerintah telah menyediakan program untuk perkembangan usaha kecil. Namun, peran pemerintah saja belum cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah khususnya BSI (BRI Syariah) sebagai salah satu mitra pemerintah dapat membantu penguatan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Bank BSI (BRI Syariah) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan yang disediakan di BSI (BRI Syariah) guna untuk membantu para pelaku usaha UMKM, pembiayaan ini bersifat inventif untuk nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha. Pembiayaan ini menyediakan pinjaman untuk pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pinjaman dapat diberikan untuk usaha yang bersifat halal dan dikelola oleh nasabah dengan baik dan pihak BSI (BRI Syariah) sebagai penyedia modal akan

---

<sup>7</sup> Isara Abda Noka, "Efektivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah". *Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 1 No. 2. 2019, hal.322

melakukan survey terhadap prospek usaha yang dilakukan. Pembiayaan murabahah di BSI (BRI Syariah) memiliki tujuan mengembangkan kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Berikut adalah laporan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di BSI (BRI Syariah).

**Tabel 1.4**  
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di BSI (BRI Syariah) Tulungagung  
Periode 2018-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah nasabah</b>
2018	148
2019	187
2020	471
<b>Total</b>	<b>806</b>

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2018 jumlah nasabah sebanyak 148 nasabah, di tahun 2019 berjumlah 187 nasabah dan pada tahun 2020 jumlah nasabah meningkat sangat drastis yaitu berjumlah 471 nasabah. Dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Alasan nasabah yang beralamt di Sumbergempol memilih Pembiayaan *murabahah* di BSI (BRI Syariah) dari pada menggunakan jasa bank konvensional yaitu melainkan karena pelayanannya dan juga biaya administrasi yang diberikan oleh BSI (BRI Syariah) yang lebih ringan daripada bank konvensional, margin yang diberikan murah, prosesnya lebih mudah, dan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga usaha nasabah dapat terbantu dengan adanya penambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dari kondisi lapangan yang ada, terlihat bahwa BSI (BRI Syariah) menjalankan prinsip Islam dan sesuai dengan syariat Islam sehingga nasabah

tidak khawatir lagi dengan keuntungan atau hasil yang didapat.

Efektivitas di sini menunjukkan keberhasilan dari perspektif tercapai atau tidak sasaran yang sudah diterapkan. Karena jika hasil kegiatan UMKM semakin mengarah pada sasaran maka semakin efektif pembiayaan yang diberikan, dan jika hasil kegiatan UMKM tidak mendekati sasaran maka pembiayaan tersebut belum efektif. Indikator suatu efektivitas dapat dilihat sebagai berikut diantaranya ketepatan waktu, perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan dalam melakukan perintah, dan ketepatan sasaran.<sup>8</sup> Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah). Adapun alasan peneliti memilih BSI (BRI Syariah) dibandingkan dengan bank syariah lainnya yakni dapat dilihat dari harga pembiayaan yang kompetitif dan proses pencairan yang cepat. Selain itu dalam melayani nasabah, karyawan BSI (BRI Syariah) ini sangat baik dan ramah sehingga menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BSI (BRI Syariah).

Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Produk Pembiayaan *Murabahah* dalam Menunjang Pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI Kantor Kas Tulungagung (BRI Syariah)).”**

---

<sup>8</sup> Gary Jonathan Mingkid, dkk, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* . Vol. 2 No. 2. 2017, hal. 3-4

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan *murabahah* dalam menunjang pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah))?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam menunjang pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah))?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksud untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan *murabahah* dalam menunjang pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah)).
2. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam menunjang pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah)).

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan selaku sarana untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dalam masalah efektivitas produk pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan modal UMKM.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk segala aspek, diantaranya:

### a. Bagi Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan bisa mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah serta mampu mengaplikasikannya di kehidupan masyarakat.

### b. Bagi BSI KK Tulungagung (BRI Syariah)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas produk pembiayaan *murabahah* dalam menunjang pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah)).

### c. Bagi Akademisi

Diharapkan untuk menambah pandangan tentang ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dalam hal pengembangan perekonomian UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah)).

### d. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa menjadikan masyarakat lebih mengetahui tentang Lembaga Keuangan Islam atau Syariah.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul dan membatasi pembahasan serta menghindari miscalculasi bagi pembaca mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka perlu dibuat penjelasan tentang istilah-istilah tersebut, yaitu:

#### a. Efektivitas

Salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankan selain efisiensi.<sup>9</sup>

#### b. Pembiayaan *Murabahah*

Akad jual beli barang pada harga pokoknya dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.<sup>10</sup>

#### c. UMKM

Suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil.

#### d. Pengembangan UMKM

Pengembangan memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mengembangkan. Sedangkan usaha mikro merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha

---

<sup>9</sup> Rohmah Niah Musdiana, Sri Herianingrum, "Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)". *JEBIS*. Vol. 1 No. 1. 2015, hal. 24

<sup>10</sup> Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra, "Pernyataan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No. 1. 2016, hal. 3

mikro, usaha kecil, usaha menengah adalah didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan).

e. Bank Syariah

Yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>11</sup>

2. Definisi Operasional

Berdasarkan beberapa definisi konseptual diatas bahwa penelitian yang berjudul “Efektivitas Produk Pembiayaan *Murabahah* dalam Menunjang Pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah))” adalah suatu penelitian yang mengarah pada pembahasan tentang efektivitas di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah)” dalam menunjang pengembangan UMKM di Sumbergempol dengan menggunakan produk pembiayaan *Murabahah*.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta lengkap tentang proposal ini, disini peneliti menggunakan pokok-pokok pikiran di bawah ini:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

---

<sup>11</sup> Ahmad Supriyadi, “Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia”. *Malia*. Vol. 1. 2017, hal. 3

Bagian inti terdiri dari enam bab yang tersusun dalam pembahasan yang sistematis, yaitu:

BAB I ialah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II ialah uraian tentang tinjauan pustaka atau berisi teori-teori terkait efektivitas produk pembiayaan dalam menunjang pengembangan UMKM dengan menggunakan produk *murabahah*. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu dengan tema yang sama atau mirip.

BAB III ialah metode penelitian. Dalam hal ini membahas rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV ialah hasil penelitian. Di sini berisi pemaparan dan temuan penelitian terkait efektivitas produk pembiayaan dalam menunjang pengembangan UMKM dengan menggunakan produk *murabahah*.

BAB V yaitu pembahasan. Di sini berisi pembahasan secara mendalam berdasarkan fakta lapangan yang telah disajikan dalam pemaparan data dan temuan penelitian, selanjutnya peneliti analisis secara mendalam sesuai dengan teori dan disiplin ilmu yang berkaitan.

BAB VI yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan, implikasi teoritis maupun praktis dan saran yang berkaitan

dalam penelitian. Bagian penutup terdapat dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.